

## **Populisme Agama Ditinjau Dari Perspektif Teologi Katolik**

**Yustinus**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

Email : tinus.tinus68@gmail.com

**Robertus Wijanarko**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

**Gregorius Tri Wardoyo**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

*Recieved: 24 Oktober 2023 Revised: 30 Oktober 2023 Published: 31 Oktober 2023*

### **Abstract**

This study is intended to critically elaborate Catholic Theology on Religious Populism, primarily as articulated in the Encyclical Fratelli Tutti (On Fraternity and Social Friendship), and its relevance to critically investigate politics of Religious Populism in Indonesia. Since the politics of Populism is correlated with the politic of religious identity, this research then addresses the correlation of those two political phenomena. We utilize litterer study as a method in exploring this study. After doing a biblical critical analysis, we then investigate the Encyclical Fratelli Tutti, which gives an extensive account on Populism. Catholic theology, we are convinced, gives important contributions to the project of religious moderation and offers critical thoughts on religious populism that Populism could endanger the democratic foundations, such as the recognition of plurality, neglecting the rights of the marginalized and minority, and induces the crisis of humanity itself.

**Key Words:** Religious Populism; Inclusive Identity; Religious Leader; Dialogue; Fratelli Tutti

## Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk mengelaborasi secara kritis pemikiran Katolik tentang fenomena Populisme Agama, utamanya yang tertuang dalam Ensiklik Fratelli Tutti (Persaudaraan dan Persahabatan Sosial), dan relevansinya terhadap fenomena politik Populisme Agama di Indonesia. Mengingat politik Populisme Agama di Indonesia berkelindan dengan politik Identitas Agama, dengan sendirinya studi ini juga menyentuh korelasi antar kedua fenomena politik tersebut. Metode yang kami gunakan dalam kajian ini adalah penelitian literer. Kami melakukan analisis kritis terhadap text-text Kitab Suci yang bagi studi teologi Kristiani masuk dalam kategori teologi sumber; selanjutnya kami melakukan analisis kritis terhadap Ensiklik Fratelli Tutti, yang memang memberi perhatian besar tentang tema Populisme. Kami berpendapat bahwa perspektif teologi Katolik, utamanya Ensiklik Fratelli Tutti menyumbangkan gagasan-gagasan penting untuk moderasi beragama dan sekaligus kritik atas politik Populisme Agama yang bisa menghancurkan sendi-sendi sistem demokrasi, seperti pengakuan terhadap keberagaman, pengabaian hak-hak kaum marjinal dan minoritas, dan membahayakan kemanusiaan itu sendiri.

**Kata-kata Kunci:** Populisme Agama; Identitas Inklusif; Pemimpin Agama; Dialog; Fratelli Tutti

## 1. Pendahuluan

Beberapa ilmuwan politik menengarai maraknya politik Populisme kontemporer di Indonesia bertumbuh seiring dengan perkembangan sistem demokrasi liberal. Fenomena ini bukanlah khas Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara dimana politik populisme umumnya muncul dalam sistem negara demokrasi liberal.<sup>1</sup> Munculnya Populisme ditengarai sebagai “*symptom of disfunctionality*” dari sistem demokrasi liberal atau “*permanent shadow of representative politics*”<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, munculnya politik Populisme merupakan konsekuensi dari perkembangan sistem demokrasi yang mengarah ke bentuk demokrasi prosedural.<sup>3</sup> Tata politik Indonesia memang memiliki institusi-institusi politik dan prosedur yang dibutuhkan sebagai syarat demokrasi liberal, namun terwujudnya demokrasi substansial masih jauh panggang dari api. Memang ada partai-partai politik serta pembagian kekuasaan bidang eksekutif-yudikatif-legislatif; ada komunitas-komunitas masyarakat madani (*civil society*)

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Populisme: Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 5-10. Bdk. Cas Mudde and Cristobal Rovira Kaltwasser (eds.), “Populism. A Very Short Introduction,” *Populism: A Very Short Introduction*, 2017, 1-2.; Gregor Fitz et al. (eds), *Populism and The Crisis of Democracy* (London: Routledge, 2019).

<sup>2</sup> Jan-Werner Müller, *What Is Populism?* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016). 101.

<sup>3</sup> Muhtadi, *Populisme: Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral.*, 5.

beserta lembaga swadaya masyarakat; prosedur demokrasi juga dijalankan, seperti proses pemilihan umum dan pembuatan perundang-undangan, serta proses konsultasi publik dalam menyusun produk hukum. Namun, keberadaan institusi-institusi politik demokrasi liberal dan proses-proses kehidupan politik dan pengambilan keputusan belum mampu memproduksi kebijakan-kebijakan politik yang menghantar terciptanya “*bonum comune*” (kesejahteraan bersama). Hasil pembangunan masih lebih banyak dinikmati golongan tertentu, sementara sebagian besar yang lain masih tercecer. Jaminan dan dukungan terhadap keberadaan dan kehidupan kelompok minoritas, entah berdasar agama maupun etnis, juga masih jauh dari ideal. Terkesan juga proses sosial politik yang justru memperpetuasi aneka kesenjangan yang ada di tengah masyarakat. Situasi kehidupan sosial-ekonomi-politik semacam inilah yang membuka ruang berkembangnya gerakan politik Populisme di Indonesia, yakni munculnya pemimpin rakyat (*demagog*) yang tampil mengatasnamakan rakyat kebanyakan yang termarjinalkan, atau juga kaum populis dengan mengatasnamakan kelompok agama mayoritas namun merasa sebagai tertindas.

Fenomena di atas cocok dengan studi kritis Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser yang menyebut Populisme sebagai “*a thin-centered ideology*”<sup>4</sup> yang umumnya terkait dengan ideologi lain yang lebih kuat. Populisme merupakan ideologi tipis karena, tidak seperti ideologi lain seperti Liberalisme, Sosialisme, Fasisme, atau Komunisme, Populisme belum menyediakan suatu kerangka teoretik-ideologis yang sistematis-solid, suatu profil struktur politik yang jelas-rinci, atau postur struktur ekonomi yang komprehensif yang bisa diterapkan dalam tatanan kehidupan yang konkret. Karenanya, supaya bisa *survive* gerakan Populisme biasanya bersenyawa dengan ideologi atau orientasi ideologis dan gerakan yang berbeda beda entah itu nasionalisme, gerakan buruh, sosialisme, ataupun gerakan berbasis identitas keagamaan, sesuai dengan konteks dimana dia tumbuh dan berkembang.

Politik Populisme di Indonesia dewasa ini tampak lebih bersenyawa dengan politik identitas agama. Gerakan-gerakan Populisme Agama berhasil memproduksi wacana dan mengorkestrasi gerakan-gerakan politik yang membelah masyarakat menjadi kaum elite yang korup dan kaum populis yang murni; mengintroduksi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik yang ada dan legitim; melahirkan demagog-demagog pergerakan yang seolah memperjuangkan aspirasi dan hak-hak dasar rakyat; mengkampanyekan keyakinan bahwa hanya kelompok merekalah yang bisa menciptakan kehidupan politik yang menghantar pada kesejahteraan rakyat. Gerakan politik Populisme ini berjalan seiring dengan menguatnya gerakan politik identitas agama dimana aktivitas politik berbasis identitas agama menciptakan dinamika politik yang sarat

---

<sup>4</sup> Mudde and Kaltwasser, “Populism. A Very Short Introduction.”, 7.

dengan penggunaan identitas, atribut, jargon dan simbol-simbol keagamaan.<sup>5</sup> Trend ini mengintensifikasi sikap-sikap eksklusif-fundamentalis-radikal yang sebenarnya sudah lama mengemuka, berbasis orientasi politik identitas agama.

Untuk mengurai benang kusut ekkses politik populisme yang berwujud Populisme Agama yang cenderung menguat di Indonesia yang menciptakan ketegangan-ketegangan di akar rumput sampai ke tataran pemuka agama dan para elite politik yang diwarnai dengan penggunaan secara masif identitas dan simbol-simbol keagamaan, yang pada gilirannya membiakkan sikap-sikap eksklusif, fundamentalis, dan intoleran, perlu kiranya kita membedah fenomena politik Populisme Agama ini. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran kritis terhadap fenomena politik identitas, tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk menginvestigasi politik Populisme Agama. Ada dua persoalan mendasar yang perlu dikaji dalam hal ini: pertama, persoalan identitas yang menjadi dasar terbentuknya dan kiprah suatu kelompok tertentu; dan kedua, relasi politik dan agama, dua dunia yang sebenarnya berbeda ranah namun tidak jarang ditafsirkan sebagai terkait langsung demi kepentingan tertentu dari kelompok. Dalam perspektif ini penulis berpendapat bahwa upaya untuk mengembangkan moderasi beragama harus disertai dengan upaya-upaya kritis untuk membedah faktor-faktor negatif yang menyertai politik identitas dan Populisme Agama.

Kajian tentang politik Populisme Agama di Indonesia sudah cukup banyak. Untuk menunjuk beberapa contoh, misalnya Vedi R. Hadiz, dalam karyanya *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* berusaha untuk memetakan bagaimana geneologi politik Populisme Agama Islam di Indonesia (dan Timur Tengah).<sup>6</sup> Sementara itu Burhanudin Muhtadi, dalam bukunya *Populisme: Politik Identitas dan Dinamika Elektoral*, berusaha mengurai tiga isu sentral dalam dinamika demokrasi prosedural Indonesia, yakni Politik Identitas, Politik Populisme, dan Politik Elektoral.<sup>7</sup> Dengan sendirinya kedua pemikir tersebut bertolak dari perspektif berbeda, dan dengan aksentuasi fokus subjek kajian yang berbeda. Namun demikian artikulasi tentang kontribusi perspektif Katolik dalam meninjau gerakan Populisme Agama di Indonesia belumlah banyak dibahas. Memang dalam dunia Katolik dan Kristen, tema Politik Populisme juga telah menjadi subjek kajian yang menarik minat cukup banyak teolog. Namun konteks refleksi pemikiran mereka bertolak dari beberapa negara yang berbeda.<sup>8</sup> Berdasarkan kekurangan literatur referensi tersebut kami mencoba menyajikan

---

<sup>5</sup> Robertus Wijanarko, “Religious Populism and Public Sphere in Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora*. Special Ed (2021): 1–9.

<sup>6</sup> Vedi R Hadiz, *Populisme Islam Di Indonesia Dan Timur Tengah* (Jakarta: LP3ES, 2019).

<sup>7</sup> Muhtadi, *Populisme: Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral*.

<sup>8</sup> Marida Nicolaci, “The ‘People of God’ and Its Idols in the ‘One and Other’ Testaments: How Sacred Scripture Challenges Populist Rhetoric,” *Concilium* 2 (2019): 74–88.; Pieter Bevelander & Ruth Wodak. Eds., *Europe at the Crossroads Confronting Populist, Nationalist, and Global Challenges* (Lund, Sweden: Nordic Academic Press, 2019).

pandangan Gereja katolik tentang gerakan Populisme Agama dalam konteks Indonesia. Usaha ini penting, karena sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, para pemikir Katolik juga perlu menyumbangkan pemikiran dari perspektif tradisi teologisnya untuk meninjau problem yang menjadi tantangan bersama sebagai bangsa, yakni politik Populisme Agama, suatu fenomena politik populistis yang berkelindan dengan politik identitas keagamaan tertentu.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam kajian ilmiah ini kami menggunakan studi literatur sebagai metode dalam menghimpunan data, gagasan, dan pemikiran. Literatur utama dan pendukung, baik yang kami jumpai dalam buku-buku maupun Jurnal Ilmiah, kami telaah dengan analisis kritis literer. Mengingat fokus utama kajian ini adalah Ensikklik *Fratelli Tutti*, dokumen tersebut kami jadikan sebagai acuan analisis utama, yang kemudian dilengkapi dengan studi analitis kritis atas pemikiran-pemikiran teologis Kristiani terkait dengan tema Populisme Agama. Sementara itu untuk menggali gagasan-gagasan teologi biblis terakit dengan tema tersebut, kami menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap teks-teks kitab suci. Pendapat-pendapat para pemikir teologi biblis tentu saja menjadi konsideran dan referensi pendukung.

Selain itu, mengingat tema Populisme juga merupakan subjek kajian dari disiplin ilmu sosial lain, seperti Ilmu Politik dan Filsafat, kami juga menelaah pemahaman dasar dari gagasan tentang Populisme dan Populisme Agama dari perspektif Ilmu Politik maupun di dalam Filsafat. Pendekatan analisis kritis atas teks-teks ilmu sosial tersebut juga menjadi pilihan metodologi kerja kami.

Pertama-tama, kami akan menyajikan pandangan Biblis tentang fenomena Populisme Agama. Dalam bagian ini digali konsep populisme atau lebih tepatnya praktek-praktek “kaum populis” di dalam Kitab Suci yang bisa dilacak dari klaim diri bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Status ini membawa Israel pada privilese sebagai satu-satunya bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, sedang bangsa-bangsa lain dianggap sebagai kaum kafir atau pagan. Pada bagian kedua, kami akan membahas pandangan Gereja Katolik yang tertuang dalam dokumen *Fratelli Tutti*, khususnya bagian yang membahas tentang Populisme Agama. Dan pada bagian ketiga, kami akan mengangkat beberapa pemikiran kritis dari perspektif teologi Katolik atas Populisme Agama, yang sejatinya tidak bisa dilepaskan dari Politik Identitas. Dalam bagian ini uraikan dengan rinci dan

sistematis metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis masalah.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Populisme dalam Kitab Suci

Seperti ditunjukkan oleh beberapa studi, konsep populisme sangat luas pengertian dan modelnya dan dari sejarah perkembangannya, konsep populisme itu sendiri tergolong baru.<sup>9</sup> Jan-Werner Müller (2016: 2-3) mendefinisikan konsep populisme sebagai anti-elitis dan anti-pluralis, dan sebagai konsekuensi pemikiran ini ialah adanya eksklusivitas atas eksistensi diri atau kelompok dan sekaligus menganggap yang lain sebagai lawan.<sup>10</sup> Berangkat dari teori di atas, bagian ini berusaha menggali konsep populisme yang berlandaskan pada Kitab Suci, atau lebih tepatnya praktek-praktek “kaum populis” di dalam Kitab Suci, khususnya yang bisa dilacak dari status Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Status ini membawa Israel pada klaim privilese sebagai satu-satunya bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan dan bangsa-bangsa lain dianggap sebagai kaum kafir atau pagan.

Eksistensi bangsa Israel difondasikan pada kisah keluarnya bangsa Israel dari negeri Mesir (Kel. 14:1-15:18). Kepada Abraham Allah telah menjanjikan sebuah negeri yang akan diduduki oleh keturunannya dan menjadikan mereka suatu bangsa yang besar (Kej. 12:1-2). Namun jelas bahwa identitas Israel yang meliputi tanah sebagai salah satu aspek sebuah bangsa belum terealisasi. Lalu, bagaimana Israel melegitimasi eksistensi mereka? Satu-satunya hal untuk melegitimasi ini ialah peristiwa pembebasan mereka oleh Allah dari Mesir. Dengan kata lain, Peristiwa Keluaran diinterpretasikan sebagai momentum dimana Allah menjadikan Israel sebagai umat pilihan Allah; umat yang dikuduskan yakni dipisahkan dari bangsa-bangsa kafir.

Konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat Israel dengan status yuridisnya di atas ialah beberapa hal berikut:<sup>11</sup> 1) umat Israel kini menjadi milik Yahweh (Im. 25:55) yang diyakini bahwa Yahweh yang membebaskan mereka dari Mesir bukanlah sembarang Allah atau dewa-dewa seperti yang disembah bangsa-bangsa lain, melainkan Yahweh satu-satunya Allah yang hidup, 2) kebebasan yang dimiliki semua umat Israel adalah kudus, karena mereka milik Yahweh (Im. 25:42), 3) karena umat Israel adalah bangsa yang kudus, maka semua aspek kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari ciri kekudusan. 4) tanah yang akan diberikan kepada mereka hanya berstatus hak guna, bukan hak milik,

---

<sup>9</sup> Nicolaci, “The ‘People of God’ and Its Idols in the ‘One and Other’ Testaments: How Sacred Scripture Challenges Populist Rhetoric.”, 74.

<sup>10</sup> Müller, *What Is Populism?*, 2-3.

<sup>11</sup> Jean-Louis Ska, *Introduzione Alla Lettura Del Pentateuco. Chiavi per l'interpretazione Dei Primi Cinque Libri Della Biblia* (Bologna: EDB, 2012). 57-59.

dan 5) mereka tidak boleh hidup sebagaimana cara hidup bangsa-bangsa lain karena mereka telah dikuduskan atau dipisahkan oleh Yahweh dari mereka.

Dalam studinya, P. Frei dan J.P. Weinberg, seperti dikutip oleh Jean-Louis Ska,<sup>12</sup> menempatkan komposisi Kitab Pentateukh yang mengangkat kisah pembebasan Israel ke dalam periode *post-exilic*, tepatnya pada periode persiana. Pada masa ini dan setelahnya, Israel merupakan bangsa jajahan dari aneka imperium seperti Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma.<sup>13</sup> Dengan demikian, status umat pilihan Allah bisa dipahami sebagai upaya Israel *post-exilic* untuk memahami identitas mereka sebagai suatu bangsa dan sekaligus untuk mengetahui apa saja syarat sebagai umat pilihan,<sup>14</sup> dan hal ini selalu digaungkan oleh mereka.<sup>15</sup>

Upaya-upaya untuk menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah dibangun di atas aneka kisah yang intinya mau mengatakan bahwa sejak awal mula Allah sendirilah yang memilih mereka sebagai umat yang kudus. Kejadian 12:1 dst. dianggap sebagai embrio panggilan bangsa Israel sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah sungguh-sungguh keturunan Abraham, Isak, dan Yakub. Ini sekaligus menjadi dasar status sebagai umat pilihan Allah, selain kisah keluaran di atas, yakni adanya keterikatan darah dan kontrak sosial atau perjanjian yang mereka ikat dengan Allah Israel.<sup>16</sup> (Ska, 2012:296).

Status sebagai umat pilihan Allah menempatkan Israel sebagai bangsa yang unik yang (harus) berbeda dengan bangsa lain. Benih-benihnya bisa dilihat dari kisah separasi antara Abraham dan Lot, keponakannya dalam Kej. 13. Kemudian, bahwa dari Abraham dan keturunannya umat pilihan itu diasalkan semakin ditegaskan dalam kisah pengusiran Ismael (Kej. 21:10-12) dan jawaban Allah berikut ini, “Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isak” (Kej. 21:12). Lebih lanjut, kebesaran bangsa Israel dinyatakan dalam berkat Isak atas Yakub (Kej. 27:27-29). Praktis isi berkat Isak atas puteranya mengulang apa yang pernah Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya (Kej. 12:1-3). Untuk menegaskan kepemilikan sebagai umat Allah ini dibuatlah perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai pengikat antara dua pihak atau lebih. Pasca kisah keluaran, perjanjian antara umat Israel dan Allah

---

<sup>12</sup> Ska., 286, 297.

<sup>13</sup> S. Tano Simamora, *Bibel. Warisan Iman, Sejarah Dan Budaya* (Jakarta: Obor, 2014), 331-332.

<sup>14</sup> Ska, *Introduzione Alla Lettura Del Pentateuco. Chiavi per l'interpretazione Dei Primi Cinque Libri Della Biblia*, 296.

<sup>15</sup> Nicolaci, “The ‘People of God’ and Its Idols in the ‘One and Other’ Testaments: How Sacred Scripture Challenges Populist Rhetoric.” 77-78.

<sup>16</sup> Ska, *Introduzione Alla Lettura Del Pentateuco. Chiavi per l'interpretazione Dei Primi Cinque Libri Della Biblia*, 296.

diperbaharui lagi di gunung Sinai, ditandai dengan dua loh batu yang diberikan kepada Musa oleh Allah sendiri (Kel. 31).

Dalam sejarah Israel, perjanjian tersebut terus mengalami pembaharuan (Yer. 31) dan puncaknya pada diri Kristus (Luk. 22:20; 1 Kor. 11:25). Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel menjadi milik Allah pertama-tama karena dan sejauh mereka menaati hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, nabi Hosea mencatat murka Allah terhadap umat-Nya sehingga Allah tidak lagi mengasihi mereka bahkan tidak memandang umat Israel sebagai umat-Nya (Hos. 1:1-11). Tindakan Allah yang demikian itu disimbolkan dengan nama-nama anak Hosea yang dipilihkan oleh Allah sendiri, yakni Lo-Ruhama (ay. 6), artinya “tidak mengasihi” dan Lo-Ami (ay. 9), artinya “bukan umat-Ku” lagi.

Dari perspektif konsep populisme, status umat pilihan Allah ini bisa dimaknai sebagai sumber suburnya praktik ‘kaum populis’ dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Namun, harus dikatakan bahwa mendasarkan pada perikop-perikop tertentu saja tentunya kurang bijaksana dalam menilai apakah Kitab Suci mendukung populisme atau tidak. Oleh karena itu, Kitab Suci harus dibaca secara menyeluruh. Tidak hanya Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Baru juga harus dikaji. Di bawah ini beberapa perikop akan diketengahkan untuk memperlihatkan gagasan ‘kontra populisme’ yang juga ada dalam Kitab Suci itu sendiri.

Kejadian 17:20 mencatat bahwa Allah juga memberikan berkat-Nya kepada Ismael dan keturunannya seperti berikut ini, “Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.” Dialog Abraham dengan Allah memperlihatkan bahwa di satu sisi Abraham sendiri mencoba memasukkan Ismael sebagai ‘milik’ Allah (Kej. 17:18) dan di sisi lain Allah tidak mengeluarkan, meniadakan Ismael. Ini berarti bahwa Ismael adalah anak Abraham sekaligus juga anak Allah.<sup>18</sup> Lebih lanjut, dalam Kej. 25, ketika Abraham meninggal dan dikuburkan di dalam gua Makhpela, nampak hadir di situ Isak dan Ismael, anak-anak Abraham (ay. 9). Kehadiran mereka bisa dimaknai sebagai simbol kehadiran dan hidup bersama dua budaya dan religius yang berbeda.<sup>19</sup> Singkatnya, tindakan Allah yang memberkati Ismael dan keturunannya (Kej. 16) mau menegaskan bahwa Allah mau mendobrak tembok pemisah yang dibangun oleh manusia.

---

<sup>17</sup> D.J. McCarthy, *Old Testament Covenant. A Survey of Current Opinions* (Oxford: Basil Blackwell, 1973). 1.

<sup>18</sup> Massimo Grilli and Joseph Maleparampil (eds.), *Il Diverso e Lo Straniero Nella Bibbia Ebraico-Cristiana. Uno Studio Esegético-Teologico in Chiave Interculturale*. (Bologna: EDB, 2013). 108.

<sup>19</sup> Massimo Grilli and Maleparampil. (eds). *Il Diverso e Lo Straniero Nella Bibbia Ebraico-Cristiana*. 110.

Sementara itu, dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan (Gal. 3:28). Menurut pandangan Rasul Paulus, karena Kristus, “semua orang adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah” (Gal. 3:29). Dengan demikian, Rasul Paulus mau menggarisbawahi karakter Allah yang nampak dalam diri Kristus (1 Kol. 1:15); Dia ialah pribadi pemersatu. Atau dalam bahasa Yohanes Dia adalah Kasih (1 Yoh. 4:8). Merujuk pada konteks sosial-historis dari surat di atas diketahui adanya konflik kebudayaan di antara orang-orang Kristiani-Yahudi dengan orang-orang Kristiani Non-Yahudi yakni orang-orang Galatia yang *notabene* adalah orang-orang Asia Kecil, sekarang Turki. Orang Kristiani-Yahudi rupanya bersikukuh agar jemaat Galatia bersunat sesuai dengan hukum Taurat Yahudi (Kej. 17:9-14) agar status keanggotaan mereka sebagai umat Allah sah menurut hukum. Rupanya gagasan privelese sebagai umat pilihan dan segala konsekuensinya masih melekat pada orang-orang Kristiani-Yahudi. Mentalitas inilah yang mau dinetralisir oleh Rasul Paulus. Karena mereka adalah milik Kristus, maka tidak ada lagi dikotomi Yahudi dan non-Yahudi. Semua adalah sama.

Demikianlah, nampak bahwa cara berpikir orang Israel yang secara semantik muncul dalam penggunaan istilah yang berbeda untuk menyebut diri mereka terkait kelompok di luar mereka pelan-pelan mengalami perubahan substansi. Ada perbedaan antara *goyyim* dan *am*. Secara semantik kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama yakni *people*, tapi dalam penggunaannya kata *goyyim* disematkan pada bangsa lain di luar Israel untuk mengatakan bahwa mereka adalah pagan.<sup>20</sup> Sedangkan untuk orang Israel dipakai istilah *am* dengan makna sebagai umat pilihan. Dalam Mat. 25:32 muncul istilah πάντα τὰ ἔθνη (*panta ta etne*) yang artinya “semua bangsa” dimana kata ἔθνος (*ethnos*) memiliki arti yang sama dengan *goyyim* dalam bahasa Ibraninya. Dalam perikop mengenai pengadilan terakhir tersebut dicatat bahwa mereka yang disebut *pagan* juga akan memperoleh keselamatan. Dari pembacaan Perjanjian Baru bisa disimpulkan bahwa tidak ada lagi pembedaan antara umat pilihan Allah dengan yang bukan pilihan Allah. Semangat inklusivitas sangat kentara dalam cara berpikir dari perikop-perikop baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Artinya, keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Putera-Nya bersifat universal

---

<sup>20</sup> Bdk. Emanuel Gerrit Singgih, “Moderasi Beragama Sebagai Hidup Yang Baik: Tiga Tanggapan Terhadap Buku Pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia Mengenai Moderasi Beragama,” *Gema Teologika* 2, no. 10 (2022): 191–212.

diperuntukkan juga bagi semua orang baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi.

### 3.2. Populisme Agama dan Ensiklik Fratelli Tutti.

Seperti dikatakan sebelumnya ada dua persoalan mendasar yang perlu dikaji, yakni pertama, persoalan identitas yang menjadi dasar dari klaim diri sebagai pihak rakyat (*populis*) yang benar- suci, melawan pihak lain (*non-populis*) yang dipandang penindas-kafir; kedua, soal relasi politik dan agama yang sebenarnya merupakan dua dunia dengan ranah berbeda dan tidak terkait langsung, namun dalam populisme agama keduanya disenyawakan demi kepentingan tertentu. Bagaimana kedua hal ini dibahas dalam Ensiklik *Fratelli Tutti* disajikan di bawah ini.<sup>21</sup>

#### 3.2.1 Kritik terhadap Populisme

Pada awal pembahasannya, Paus Fransiskus menegaskan bahwa untuk memungkinkan perkembangan komunitas mondial yang mampu mewujudkan persaudaraan di antara bangsa-bangsa, diperlukan kebijakan politik yang lebih baik yang benar-benar memperjuangkan kebaikan bersama; namun sayangnya, politik saat ini justru sering mengambil bentuk-bentuk yang menghambat hal tersebut, khususnya yang bersembunyi di balik populisme dan liberalisme.<sup>22</sup> Paus Fransiskus mengkritisi realitas fenomena populisme yang telah menyerbu media komunikasi dan pembicaraan umum yang bahkan sampai membuat masyarakat terpecah dengan kategori populis dan non-populis. Menurut Paus, menempatkan paham Populisme sebagai kunci untuk menafsirkan realitas sosial mengandung suatu kelemahan, yakni mengabaikan fakta tentang legitimitas arti kata bangsa atau rakyat (*populus*). Populisme yang mewabah itu sebenarnya justru menyebabkan peniadaan konsep “demokrasi” (pemerintahan oleh rakyat), sementara konsep “bangsa/rakyat tetap diperlukan untuk menegaskan bahwa masyarakat adalah lebih dari sekadar sekumpulan individu.”<sup>23</sup> Paus menunjukkan akar masalah dari Populisme yakni pemahaman yang salah atas konsep bangsa sebagai sesuatu konsep yang tertutup, statis, tidak lagi terbuka pada perubahan.<sup>24</sup>

Bersamaan dengan kritik terhadap paham populisme, Paus juga memberikan kritik keras terhadap para *demagog* (pemimpin rakyat) yang menggunakan politik populis. Paus Fransiskus membandingkan para pemimpin populis yang

---

<sup>21</sup> Ensiklik Fratelli Tutti (FT) ditandatangani oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 Oktober 2020 di Assisi dan dimaksudkan untuk mempromosikan persaudaraan dan persahabatan sosial dalam skala global. Ensiklik ini cukup panjang, terdiri atas 287 nomor artikel yang terbagi menjadi 8 bab. Dalam struktur keseluruhan Ensiklik, Populisme dibicarakan dalam Bab V dalam konteks pembahasan tentang “Politik yang lebih baik”, tepatnya dalam artikel no 156-162.

<sup>22</sup> FT 156.

<sup>23</sup> FT 157.

<sup>24</sup> FT 158.

manipulatif dengan pemimpin rakyat yang sejati.<sup>25</sup> Paus menegaskan bahwa tetap ada pemimpin ‘populer’, yang merakyat, yang mampu menafsirkan perasaan bangsa, dinamika budayanya dan trend-trend besar masyarakat, dan bahwa pelayanan yang mereka berikan mempunyai karakter menyatukan dan mengarahkan, sehingga dapat menjadi landasan untuk suatu proyek perubahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Para pemimpin seperti ini mempunyai karakter terbuka dan inklusif yang menunjukkan kemampuan untuk memberi ruang kepada orang lain dalam mencari kebaikan bersama. Namun sebaliknya, Paus mengingatkan adanya pelayanan para *demagog* populisme yang tidak sehat yang sifatnya manipulatif dengan “mengeksplotasi budaya bangsa secara politis, dengan bendera ideologis apa pun, guna melayani proyek pribadinya dan kelangsungan kekuasaannya.”<sup>26</sup> Lebih lanjut Paus juga mengingatkan cara-cara tidak sehat para *demagog* untuk mendapatkan popularitas yakni dengan “mengobarkan kecenderungan terendah dan egois dari beberapa sektor penduduk.” Kampanye politik yang diwarnai dengan politik primordialisme rasis atas dasar suku, agama, ras semacam inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di antara masyarakat atau bangsa, dan bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi ketika populisme ini menjadi suatu “perampasan kekuasaan atas institusi-institusi dan hukum.”<sup>27</sup> Lebih lanjut, Paus mengajak waspada terhadap cara pemimpin populis yang sering hanya mengejar kepentingan segera (instan) dan bukan kepentingan yang lebih luhur. Paus Fransiskus mengkritisi bahwa sering terjadi bahwa “untuk menjamin suara atau dukungan, mereka berusaha memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi tanpa meningkatkan komitmen yang kuat dan berkesinambungan untuk menyediakan sumber daya bagi perkembangan masyarakat”<sup>28</sup>

### 3.2.2 Populisme dan Identitas Agama dan Orang Beriman

Mengingat masalah Populisme Agama yang mengaitkan peran agama dalam politik kemasyarakatan, beberapa poin yang dikemukakan Paus penting bagi kita.<sup>29</sup> Pada awal Paus menegaskan bahwa pelbagai agama dan sebagai orang beriman kita meyakini bahwa tidak akan ada alasan yang kuat dan mantap untuk panggilan kepada persaudaraan tanpa keterbukaan kepada Bapa dari semua: “hanya dengan kesadaran sebagai anak-anak yang bukan yatim piatu ini, kita bisa

---

<sup>25</sup> FT 159.

<sup>26</sup> FT 159.

<sup>27</sup> FT 159; Cas Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe* (New York: Cambridge University Press, 2009).; Ihsan Yimlaz, “Right-Wing Hegemony and Immigration: How the Populist Far-Right Achieved Hegemony Through the Immigration Debate in Europe,” *Current Sociology* 60, no. 3 (2012): 368–81.

<sup>28</sup> FT 161.

<sup>29</sup> FT Bab VIII

hidup dalam damai satu sama lain.”<sup>30</sup> Dalam perspektif ini Paus menggarisbawahi prinsip keadilan dalam hubungan antar-manusia berdasarkan pengakuan akan “kebenaran yang mengatasi segalanya, dan bagi manusia menjadi norma untuk mewujudkan jati dirinya sepenuhnya.”<sup>31</sup> Paus mengingatkan kenyataan bahwa mengistimewakan “kepentingan khas suatu kelas, golongan atau negara mau tak mau akan menimbulkan pertentangan antara pelbagai pihak” dan oleh karena itu dibutuhkan pengakuan akan adanya kebenaran yang melampui segalanya supaya tidak terjadi pengendalian “kekuatan kekuasaan” dimana setiap orang berusaha mengerahkan segala upaya yang ada padanya untuk “memaksakan kepentingan dan pandangannya sendiri dengan mengesampingkan hak-hak sesamanya.”<sup>32</sup>

Paus juga menegaskan bahwa sumbangan orang beriman adalah menghadirkan kesaksian tentang Allah yang dalam pengalaman adalah baik bagi tata kehidupan masyarakat: “sejauh orang mencari Allah dengan tulus maka akan terbantu untuk mengakui satu sama lain sebagai teman seperjalanan, saudara sejati” dan sebaliknya, “bila Allah diusir dari masyarakat maka akan timbul pelanggaran-pelanggaran hak-hak manusia.”<sup>33</sup> Paus menandakan bahwa di antara penyebab utama krisis dunia modern adalah “ketidakpekaan hati nurani manusia, penjarahan dari nilai-nilai agama dan individualisme yang tersebar luas disertai dengan filsafat materialistis yang mendewakan manusia dan memperkenalkan nilai-nilai duniawi dan materiil sebagai pengganti prinsip-prinsip tertinggi dan transendental”<sup>34</sup>. Dalam perspektif ini, Paus membela hak kaum agamawan dalam debat publik. Menurut Paus tidaklah dapat diterima bahwa dalam debat publik hanya orang-orang yang berkuasa dan para ilmuwan boleh memiliki suara; sebaliknya, harus ada ruang untuk sumbangan pemikiran yang berasal dari latar belakang religius yang mengumpulkan pengalaman dan hikmat selama berabad-abad.

Paus lebih lanjut membahas secara khusus prinsip keterlibatan Gereja Katolik dalam politik. Berdasarkan pengalaman sejarahnya, Gereja Katolik pada akhirnya menganut paham pemisahan antara gereja dan negara.<sup>35</sup> Dalam pemahamannya memang muncul aneka tafsiran: sebagian berpendapat ada pemisahan yang bahkan ekstrim, yakni bahwa Gereja seharusnya hanya mengurus hal-hal rohani dan dilarang untuk campur tangan dalam urusan

---

<sup>30</sup> FT 272

<sup>31</sup> FT 273

<sup>32</sup> FT 273.

<sup>33</sup> FT 274

<sup>34</sup> FT 275

<sup>35</sup> Bdk. John Jr Witte, “The History of Separation of Church and State: Facts, Fictions, and Future Challenges,” *Journal of Church and State* 48 (2006): 15–46.; Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

negara.<sup>36</sup> Namun ada juga penafsiran lebih lunak dimana kuasa gereja dan kuasa dunia saling berinteraksi.<sup>37</sup> Dalam ensiklik, Paus Fransiskus menegaskan bahwa meskipun menghormati otonomi politik, Gereja tidak membatasi misinya ke ranah privat.<sup>38</sup> Sebaliknya, “ia tidak bisa dan bahkan tidak boleh tinggal terpinggir” dalam membangun dunia yang lebih baik, juga tidak berhenti “membangkitkan kekuatan spiritual” yang dapat menyuburkan seluruh kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan persoalan identitas kelompok yang seringkali juga dijadikan pendasaran populisme, Paus menjelaskan tentang soal identitas kristiani yang tetap khas namun tidak meniadakan kelompok lain.<sup>40</sup> Dikatakan oleh Paus bahwa “Gereja menghargai tindakan Allah dalam agama-agama lain, dan tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang”<sup>41</sup> Berkaitan dengan penghormatan atas hak semua orang, juga kaum minoritas, Paus menegaskan sikap Gereja yang menghormati dan mendukung kebebasan mereka yang bukan kristen yang menjadi minoritas di wilayah mayoritas Kristen. Ada hak asasi manusia yang tidak boleh dilupakan di jalan persaudaraan dan perdamaian, yaitu kebebasan beragama bagi pemeluk semua agama”<sup>42</sup>

### 3.2.3 Populisme, Agama dan Kekerasan.

Berkaitan dengan politik Populisme Agama yang sering kali terkait dengan praktek kekerasan yang justru dilakukan oleh kaum beragama, ada beberapa pemikiran Paus Fransiskus yang perlu dikemukakan. Pertama-tama, Paus yakin bahwa jalan perdamaian antar agama adalah mungkin dan bahwa titik awalnya adalah “cara pandang Allah” yakni keyakinan bahwa “Allah tidak melihat dengan mata-Nya, Allah melihat dengan hati-Nya. Dan kasih Allah adalah sama untuk

<sup>36</sup> Bdk. Forrest Church, *The Separation of Church and State*. (Boston: Beacon Press, 2004).

<sup>37</sup> Andrew Whitehead and Samuel L. Perry, *Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

<sup>38</sup> FT 276.

<sup>39</sup> FT 276; Steven K Green, *Separating Church and State: A History* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022).; Patrick A and Robert L Wailer Jones, “A Model of Catholic Social Teaching: Assessing Policy Proposals,” *The Catholic Social Science Review* 15 (2010): 283–95.

<sup>40</sup> FT 276.

<sup>41</sup> FT 277. Bdk. Mochamad Ziaul Haq & Leonardus Samosir, “Fratelli Tutti: Brotherhood Without Boundaries,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2019): 267–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.17936>.; Roberto Catalano, “Pope Francis’ Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam.,” *Religions* 13 (2022): 279, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel13040279>.

<sup>42</sup> FT 278.

setiap orang, apa pun agamanya.<sup>43</sup> Dalam perspektif ini dikemukakan bahwa “umat beriman perlu menemukan ruang untuk berdialog dan berkarya bersama demi kebaikan bersama dan kesejahteraan orang-orang miskin.”<sup>44</sup> Berkaitan dengan soal identitas umat beriman, Paus menegaskan bahwa bukan kita memperlemah atau menyembunyikan keyakinan-keyakinan kita sendiri agar bisa berjumpa dengan orang lain yang berpikir secara berbeda, melainkan bahwa kesadaran diri yang mendalam mendalam akan identitas diri justru memungkinkan untuk memperkaya orang lain dengan sumbangan khususnya. Sumbangan khas orang beriman adalah “sebagai orang beriman ... ditantang untuk kembali ke sumber-sumber kita dengan berfokus pada yang terpenting: menyembah Allah dan mengasihi sesama, agar jangan sampai beberapa aspek ajaran kita, keluar dari konteksnya, akhirnya menyulut pelbagai bentuk penghinaan, kebencian, xenofobia, dan penolakan terhadap orang lain.”<sup>45</sup> Paus menandakan bahwa “kekerasan tidak memiliki dasar dalam keyakinan agama yang mendasar, tetapi hanya dalam distorsinya.”<sup>46</sup>

Paus juga mengingatkan pentingnya peran para pemimpin agama khususnya terkait dengan aneka masalah yang muncul dalam Populisme Agama. Paus menandakan bahwa “kekerasan fundamentalis di beberapa kelompok agama apa pun kadang-kadang dipicu oleh kecerobohan para pemimpinnya.”<sup>47</sup> Sekali lagi ditandakan bahwa penyebab dari kekerasan itu bukanlah pada agama, melainkan pada faktor para pemimpin agama (ulama) yang mempunyai peran sentral dalam pengajaran dan tuntunan hidup beragama para penganut agama. Para pemimpin agama mempunyai peran penting untuk membangun perdamaian, yakni bahwa sebagai pemimpin agama mereka dipanggil untuk menjadi rekan dialog sejati, untuk bekerjasama dalam membangun perdamaian, “bukan sebagai makelar, melainkan sebagai mediator yang autentik”<sup>48</sup> Paus mengkritik dengan terus terang bahwa sering yang terjadi bahwa dalam populisme para pemimpin agama bertindak sebagai “makelar yang berusaha memberikan ‘diskon’ kepada semua pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.” Seharusnya mereka bertindak sebagai mediator karena “mediator, di sisi lain, adalah orang yang tidak menyimpan apa pun untuk dirinya sendiri, tetapi dengan murah hati memberikan

---

<sup>43</sup> FT 281

<sup>44</sup> FT 282; bdk. Rafael Luciani, *Pope Francis and the Theology of the People* (New York: Marynoll, 2018).

<sup>45</sup> FT 282.

<sup>46</sup> FT 282; Romano Gentile, *Politics as Religion* (Princeton: Princeton University Press, 2006).; Ateş Altmordu, “The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective,” *Politics & Society* 38, no. 4 (2010): 517–51.

<sup>47</sup> FT 284.

<sup>48</sup> FT 284

dirinya sendiri, sampai habis, dengan mengetahui bahwa satu-satunya pendapatan adalah perdamaian.”<sup>49</sup>

Pada akhirnya, Paus dengan tegas mengulangi seruan-seruan pada dokumen Abu Dhabi<sup>50</sup> dimana ditegaskan bahwa “agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga tidak boleh memancing kekerasan atau penumpahan darah. Realitas tragis ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Hal-hal tersebut adalah hasil dari manipulasi agama-agama untuk tujuan politik dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang, dalam perjalanan sejarah, telah mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen keagamaan di hati para perempuan dan laki-laki [...]. Allah, Yang Maha-kuasa, tidak perlu dibela oleh siapa pun dan tidak ingin nama-Nya digunakan untuk menteror orang-orang”<sup>51</sup> Dan sebagai penutup, Paus menyerukan kembali kesepakatan tentang jalan untuk mewujudkan persatuan, persaudaraan dan perdamaian, yakni: “budaya dialog sebagai jalan; kerja sama timbal balik sebagai kode etik; saling pengertian sebagai metode dan kriteria”<sup>52</sup>

### 3.3. Beberapa Pemikiran Kristis

Berdasarkan gagasan-gagasan dasar Kitab Suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan pendalaman gagasan pokok pemikiran teologis Katolik sebagaimana tertuang dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*, kami akan menyajikan beberapa pemikiran kritis dari perspektif Katolik mengenai politik populisme Agama di Indonesia yang nyatanya tak terpisahkan dari praktek-praktek politik Identitas Agama.

#### 3.3.1 Sikap Kritis terhadap Populisme Agama.

Gagasan fundamental, baik yang diamanatkan oleh sumber dasar berteologi, yakni Kitab Suci, dan ajaran pimpinan tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, sebagaimana tertuang dalam *Fratelli Tutti* adalah dorongan terus menerus untuk membangun, merawat, dan mengembangkan komunitas manusia yang inklusif. Karena itu aneka upaya, gerakan, ataupun strategi politik yang mengintroduksi dan melanggengkan aneka bentuk segregasi sosial dan membelah masyarakat secara dikotomis perlu terus dikritisi dan dilawan. Politik Populisme Agama, yang mengglorifikasi (memanfaatkan) identitas kelompok agama tertentu sebagai

<sup>49</sup> FT 284. Bdk. and A. Race Kasimow, H., *Pope Francis and Interreligious Dialogue: Religious Thinkers Engage with Recent Papal Initiatives* (Palgrave: MacMilan, 2018).

<sup>50</sup> Pope Francis and Ahmed Mohamed Ahmed al-Tayyeb, *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*. (Abu Dhabi, 2019), <https://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticane%0Avents/en/2019/2/4/fratellanza-umana.html> %0A.

<sup>51</sup> FT 285

<sup>52</sup> FT 285

kaum puritan, populis, dan eksklusif, sembari menghadapkannya dengan kelompok lain yang dianggap korup (kafir) atau berafiliasi dengan kaum elite sejatinya merupakan gerakan politik partisan yang menyuburkan benih-benih eksklusivisme dan perpecahan yang terjadi dalam masyarakat kita.

Akar dari kerangka pikir Populisme, sebagaimana ditengarai oleh *Fratelli Tutti*, adalah kecenderungan mengabstraskan rakyat (*populum*) semata ke dalam kategori logis dan metafisis, dan diklaim termanifestasi melulu dalam kelompok mereka beserta hak dan aspirasi yang mereka perjuangkan; sementara kelompok lain dikerangkakan secara metafisis sebagai kelompok yang tidak populis dan korup. Mengingat upaya-upaya untuk membelah masyarakat ke dalam identitas-identitas berbeda secara eksklusif tersebut dilakukan dengan gerakan yang memanfaatkan simbol-simbol, jargon-jargon, retorika agama, maka upaya untuk mengkritisi gerakan politik semacam ini perlu dilakukan juga dengan gerakan menelanjangi kedok-kedok yang mereka gunakan. Kita juga perlu membangun kontra-narasi untuk mematahkan narasi-narasi yang mereka bangun untuk melanggengkan maksud-maksud mereka.<sup>53</sup> Selain itu kerangka pikir yang berkuat dalam dataran logis-metafisis dalam mengidentifikasi apa yang oleh kaum populis kategorikan sebagai “populum” kiranya perlu didaratkan ke dalam realitas *populum* yang nyatanya plural dan majemuk karena seringkali proses berpikir yang abstrak-metafisis tersebut gagal untuk memahami realitas masyarakat konkret yang majemuk, beserta problem-problem yang sejatinya mereka hadapi, yakni kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, eksploitasi, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Terbutakan oleh kerangka pikir abstrak-metafisis dan ambisi untuk meraih kekuasaan demi kepentingan kelompok sendiri, kaum populis seringkali tidak mampu mengidentifikasi bahwa problem-problem kemiskinan, ketidakadilan, marginalisasi juga dialami oleh anggota masyarakat lain dan minoritas, yang seringkali tidak dikategorikan sebagai kelompok mereka dan karenanya bukan menjadi bagian dari agenda perjuangan mereka. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*), kaum populis hanya berambisi untuk meraih kekuasaan, tanpa memikirkan program yang komprehensif dan jelas untuk mewujudkan secara konkret kesejahteraan rakyat. Karenanya merujuk pada pemikiran dalam perspektif katolik kita harus memproduksi narasi-narasi dan gerakan konkret untuk membangun masyarakat yang terbuka dan inklusif, dimana ada tempat untuk semua orang termasuk yang paling lemah dan kelompok minoritas, dan dimana budaya-budaya dan agama yang berbeda dihormati,

---

<sup>53</sup> Hans A. Harmakaputra, “Fratelli Tutti and Interreligious Friendship: An Indonesian Christian Reflection,” *The Journal of Social Encounters* 5, no. 1 (2021): 14–18, [https://digitalcommons.csbsju.edu/social\\_encounters/vol5/iss1/4](https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol5/iss1/4).

<sup>54</sup> Pasquale Ferrara, *Il Mondo Di Francesco – Bergoglio e La Politica Internazionale* (Milano: Edizione San Paolo, 2016).

dimana keadilan dan kesejahteraan untuk semua golongan diupayakan.<sup>55</sup> Kategori logis-metafisis atas rakyat, hanya memproduksi dan mereproduksi sikap-sikap eksklusif, dan dengan sendirinya menghalangi cita-cita untuk menciptakan persaudaraan antarumat manusia yang inklusif.

### 3.3.2 Soal kesadaran diri dan identitas diri

Dengan mengidentifikasi bahwa Populisme telah memproduksi kategori logis-metafisis tentang rakyat, yang bermuara pada pengaburan konsep demokrasi yang memberi ruang adanya kemajemukan dan perbedaan identitas, - baik identitas kultural maupun identitas agama, *Fratelli Tutti* mengisyaratkan perlunya memaknai konsep dan identitas kerakyatan sebagaimana adanya dalam realitas. Kaum populis memproduksi kategori identitas (rakyat), ke dalam sebuah kategori yang bersifat esensialistis, statis dan eksklusif. Mereka mendaku hanya kelompok merekalah yang merupakan rakyat yang sejati, dan aspirasi-aspirasi yang masuk dalam agenda perjuangan merekalah yang merupakan aspirasi rakyat sesungguhnya. Homogenisasi identitas dan aspirasi semacam itu menempatkan demokrasi dalam bahaya serius, karena tidak memberi ruang akan adanya kemajemukan identitas sosial-kultural-religius, dan meminggirkan aspirasi-aspirasi dari kelompok marginal dan minoritas.

Selain itu kerangka pikir tentang identitas bercorak esensialistis ini menampik penemuan mutakhir yang menekankan bahwa identitas adalah sebuah proses menjadi atau proses produksi. Identitas bukanlah suatu kategori yang sudah diperskripsikan, tetapi merupakan sesuatu yang terus menerus dalam proses produksi. Identitas akan terus berubah dan mengalami perubahan, demikian juga pemahaman identitas diri suatu kelompok akan terus mengalami perubahan, persis seperti perkembangan kesadaran bangsa Israel atas identitas diri mereka. Mengingat kemajemukan identitas sosial, budaya, agama merupakan kekayaan yang melekat dalam diri bangsa Indonesia ini sejak keberadaannya, maka identitas kelompok yang majemuk tersebut akan terus mengalami perkembangan dan transformasi. Identitas setiap kelompok dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang lain, dan sebaliknya pengakuan kelompok-kelompok yang majemuk atas suatu kelompok juga akan mempengaruhi corak identitas macam apa yang akan terproduksi. Proses-proses sosial yang membentuk identitas yang majemuk, yang terus berkembang inilah yang menjadi ciri paling konkret masyarakat Indonesia, dan keberadaan kemajemukan tersebut merupakan *conditio sine qua non* bagi berkembangnya sistem demokrasi (kerakyatan).

Berangkat dari pemikiran tersebut, kita bisa melihat bahwa aneka upaya kaum pemimpin populis atau demagog yang menggunakan identitas agama sebagai kategori abstrak yang tertutup, sambil meminggirkan (mengkafirkan) kelompok-kelompok berbeda yang nyatanya ada, mengingkari ciri hakiki

---

<sup>55</sup> FT 155

identitas komunal kelompok-kelompok yang majemuk yang akan terus mengalami transformasi tersebut. Dengan demikian, ditinjau dari perspektif pemikiran teologis Katolik, keberadaan komunitas-komunitas yang berbeda baik secara kultural, sosial, maupun religius perlu dipahami sebagai keniscayaan dan arena untuk bertumbuh bersama. Identitas komunal sebuah kelompok terbangun dari perjumpaan dan pengakuan dari/dan terhadap kelompok-kelompok lain. Identitas inklusif semacam ini, tidak hanya menjadi kesadaran diri “bangsa terpilih” (Israel), tetapi juga menjadi kesadaran fundamental komunitas Gereja, pun sejak awal pertumbuhannya. Selain itu perlu digaris bawahi lagi bahwa tradisi pemikiran Katolik juga memberi ruang bagi pemikiran tentang pemahaman identitas sebagai sebuah proses menjadi yang terus menerus (*in a making*).

### 3.3.3 Sikap Inklusif dan Dialogis

Dari hakekatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berkomunitas. Dasar ikatan sosial, yang mencipta identitas tersebut bisa karena ikatan budaya, agama, ras, suku, atau strata sosial. Komunitas-komunitas sosial yang majemuk dalam masyarakat Indonesia terbentuk karena kesamaan ikatan sosial, suku, budaya, maupun agama. Dasar yang berbeda-beda tersebut mencipta adanya kemajemukan identitas dari komunitas-komunitas sosial masyarakat Indonesia. Agama-agama yang ada di Indonesia umumnya juga mensyaratkan ciri komunitas sebagai karakter hakiki atau identitas dasar dari eksistensi mereka.

Dalam perjalanan sejarah, penghayatan dimensi komunitas komunitas agama-agama Abraham, Yahudi, Kristen, dan Islam mengalami transformasi. Ada fase dimana karakter eksklusif digarisbawahi, utamanya ketika komunitas agama masih perlu menegaskan identitas khas mereka yang membedakannya dengan komunitas-komunitas lain di sekitarnya, sebagaimana terlukis dalam perkembangan kesadaran diri bangsa Israel atupun dalam komunitas Kristen awali sebagaimana tercermin dalam elaborasi biblis yang kami lakukan. Tetapi kemudian datang juga fase dimana komunitas-komunitas agama tersebut menjadi lebih terbuka dan inklusif, dan juga membuka dialog-dialog dengan komunitas agama-agama atau kelompok yang mempunyai identitas yang berbeda. Fakta itu jugalah yang kami temukan dalam kajian biblis dan dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Pada umumnya justru karakter kuat dan identitas otentik dari sebuah tradisi agama, sebut saja Yahudi dan Kristen, mengemuka dan berkembang ketika kelompok-kelompok tersebut mengembangkan identitas yang inklusif, terbuka, dan berani berdialog dengan komunitas-komunitas lain yang mempunyai identitas yang berbeda. Kemampuan kelompok-kelompok agama untuk membangun identitas otentik yang inklusif dan dialogis justru akan memperkokoh kesatuan kelompok-kelompok tersebut sebagai entitas sosial, dan dengan cara demikian memungkinkan mereka untuk mempunyai filter dan daya tahan, dari aneka bentuk manipulasi dan mobilisasi, demi interese politik tertentu.

Dalam konteks agama di Indonesia, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah “vulnerabilitas” komunitas-komunitas agama, yang mudah sekali dikooptasi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Kelompok agama mudah sekali dimanfaatkan dan dimobilisasi, dengan indoktrinasi narasi-narasi identitas yang eksklusif, untuk melayani kepentingan kaum demagog atau pemimpin populis yang sejatinya hanya berorientasi pada kepentingan untuk menggapai kekuasaan. Jika politik populisme yang disokong oleh politik identitas ini kita biarkan, maka sikap-sikap eksklusif, fundamentalis, dan intoleranlah yang akan terus berkembang biak. Dalam keadaan demikian, aneka upaya dan inisiatif untuk mengembangkan moderasi beragama, akan menjadi jalan sangat terjal untuk didaki.

Selanjutnya jika komunitas-komunitas agama dibius dengan identitas palsu yang bersifat eksklusif dan intoleran, dengan narasi-narasi yang dangkal dan tendensius, maka tugas mereka untuk membangun komunitas yang steril dari interese-interese dan agenda politik tertentu akan menjadi semakin berat. Dan lebih parah lagi, tugas panggilan mereka untuk menjadi agen-agen pertumbuhan “*civil society*”, yang dibutuhkan sebagai fundamen kehidupan demokrasi, juga tidak akan terwujud. Karena itulah kerangka pikir teologi Katolik menawarkan suatu pemikiran bahwa, komunitas-komunitas sosial atau komunitas-komunitas agama hendaknya mampu menjadi komunitas yang inklusif dan dialogis, supaya mampu menjadi komunitas basis yang kuat yang sekaligus menjadi agen berkembangnya “*civil society*”.

### **3.3.4 Peran Agama dan Para Pemimpin Agama**

Sebagai dokumen yang dimaksudkan untuk mempromosikan persaudaraan dan persahabatan sosial, Ensiklik *Fratelli Tutti* juga menegaskan pentingnya sumbangan Agama dan para Pemimpin Agama untuk turut mengorkestrasi terwujudnya persaudaraan dan persahabatan antar manusia, melampaui batas-batas identitas partikular mereka. Dalam konteks berkembangnya politik populisme Agama yang berkelindan dengan politik Identitas Agama, seperti yang mewarnai dinamika dan kontestasi kehidupan politik Indonesia dewasa ini, peran para pemimpin Agama sangatlah penting. Menurut hemat kami, proyek moderasi agama di Indonesia dan upaya-upaya untuk mengkritisi politik Populisme Agama, dan penggunaan politik identitas Agama, tidak cukup diserahkan kepada para pemimpin politik atau tokoh masyarakat. Dalam situasi masyarakat dimana peran para pemimpin tradisional (informal) mulai ditinggalkan, masyarakat Indonesia yang masih religius ini masih menaruh kepercayaan besar kepada para pemimpin agama, dan karenanya peran para pemimpin agama sangatlah strategis.

Pertama-tama para pemimpin agama perlu untuk mengedukasi para penganut agama dalam komunitasnya masing-masing secara benar, sedemikian rupa sehingga agama tidak dipahami melulu secara formalistis, legalistis, dan artifisial, tetapi masuk dalam essensi atau roh Agama itu sendiri yang pasti berkaitan

dengan cinta, kemanusiaan, dan persudaraan universal. Umat beragama juga perlu diajar untuk berani bersikap kritis terhadap politik identitas dan politik populisme agama, dengan mengkritisi jargon-jargon, dan simbol-simbol-atribut agama yang mereka gunakan, termasuk naras-narasi yang mereka produksi, yang sengaja mereka desain untuk membuat kaum beragama menggenggam kesadaran identitas yang palsu. Untuk itu upaya-upaya pencerahan dalam wilayah doktrinal, ritual, dan kesalehan sosial perlu terus dikembangkan. Selain itu agenda-agenda untuk membangun identitas agama yang inklusif dan dialogis juga perlu mereka galakkan.

Selanjutnya, para pemimpin agama yang tetap menjadi refrensi bagi para penganut komunitas-komunitas agamanya, tidak membiarkan diri dikooptasi atau bahkan dimanfaatkan oleh para aktor politik, ataupun para demagog, yang tahunya hanya memburu kekuasaan. Hendaknya para pemimpin agama, tidak menggadaikan panggilan hidup mereka yang luhur, hanya untuk mengejar hal-hal yang lebih rendah, yakni fasilitas dan pengaruh kekuasaan. Sebaliknya para pemimpin agama hendaknya menjadi pelaku-pelaku terdepan dalam mengkritisi gerakan atau strategi politik parsial, seperti Populisme Agama dan politik identitas agama, yang tidak mengembangkan kesejahteraan umum. Para pemimpin agama perlu menjadi pelopor terdepan dalam membangun identitas agama yang inklusif dan dialogis, yang menghargai kesetaraan berdasarkan kemanusiaan, yang diarahkan semata untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

#### 4 Simpulan

Berdasarkan studi yang kami lakukan atas dua persoalan dasar yang ada dibalik fenomena Populisme Agama yang kami identifikasikan, dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan hal identitas diri yang bersumber pada teks Kitab Suci, nampak bahwa beberapa referensi teks Kitab Suci mendukung kecenderungan untuk menonjolkan ciri-ciri khas sebagai penanda identitas eksklusif sebagaimana terjadi pada bangsa Israel ketika mereka memahami identitas dirinya sebagai bangsa terpilih, dan juga komunitas Kristen awali yang membedakan dirinya dengan bangsa-bangsa lain yang dianggap “kafir.” Pembacaan Kitab Suci yang tidak menyeluruh bisa dijadikan klaim untuk embrio Populisme Agama. Namun demikian pembacaan teks Kitab Suci yang utuh dan komprehensif menunjukkan bahwa meskipun pada satu sisi bangsa Israel dan komunitas Kristen awali memahami identitas agama yang khas, pada sisi lain mereka menunjukkan sikap-sikap inklusif, mengakui keberadaan yang lain, dan dialogis. Kedua, berkaitan dengan relasi politik dan agama yang juga ada dibalik fenomena Populisme Agama, studi atas Ensiklik *Fratelli Tutti* menyumbangkan arah yang perlu kita perhatikan dan poin-poin kritis terhadap Populisme Agama. Teologi Katolik menegaskan bahwa politik yang ideal, adalah politik *bonum commune*, politik yang dimaksudkan untuk mewujudkan

kesejahteraan bersama. Ketika Gereja menengarai bahaya Populisme Agama dan Politik Identitas bagi kehidupan demokrasi, tentu saja Gereja tidak sekedar membela demokrasi sebagai sebuah sistem *an sich*, tetapi sejauh sistem demokrasi ini masih mencita-citakan terwujudnya *bonum commune* dan melindungi hak-hak dasar manusia, Gereja akan tetap mengawalinya. Karena itu aneka gerakan, strategi atau sistem politik yang mengedepankan pembelahan masyarakat dan memupuk sikap-sikap identitas eksklusif, termasuk di dalamnya politik identitas agama dan Populisme Agama, perlu terus dikritisi dan ditentang. Secara khusus, menjadi relevan untuk memperhatikan kritik keras Paus Fransiskus terhadap para demagog-demagog politik dan para pemimpin agama. Justru para demagog politik inilah yang manipulatif dan membius *populum*, sehingga mereka tidak pernah mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar dan aspirasi-aspirasi politik mereka yang otentik. Berhadapan dengan bahaya para demagog politik inilah Paus mengundang para pemimpin agama untuk mengambil peran yang aktif dan kritis, supaya mereka tidak dimanfaatkan oleh kaum demagog politik, yang memanfaatkan para pemimpin agama untuk memobilisasi masanya. Sebaliknya para pemimpin agama seharusnya mengedukasi para penganut agama yang dipimpinnya supaya tidak terkubang dalam sikap eksklusif dan intoleran, serta giat mempromosikan kerjasama, persaudaraan yang inklusif, sambil bersikap kritis terhadap aneka gerakan atau upaya untuk memanipulasi agama hanya sebagai abdi kepentingan politik parsial. Dengan cara inilah para pemimpin agama ikut terlibat dalam upaya mengembangkan moderasi beragama.

## 5 Kepustakaan

- Altmordu, Ateş. "The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective." *Politics & Society* 38, no. 4 (2010): 517–51.
- Bevelander, Pieter & Ruth Wodak (Eds.) *Europe at the Crossroads Confronting Populist, Nationalist, and Global Challenges*. Lund, Sweden: Nordic Academic Press, 2019.
- Catalano, Roberto. "Pope Francis' Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam." *Religions* 13 (2022): 279. <https://doi.org/10.3390/rel13040279>.
- Church, Forrest. *The Separation of Church and State*. Boston: Beacon Press, 2004.
- Ferrara, Pasquale. *Il Mondo Di Francesco – Bergoglio e La Politica Internazionale*. Milano: Edizione San Paolo, 2016.
- Fitzi, Gregor et al. (eds). *Populism and The Crisis of Democracy*. London: Routledge, 2019.
- Francis, Pope and Ahmed Mohamed Ahmed al-Tayyeb. *Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*. Abu Dhabi, 2019.

- Gentile, Romano. *Politics as Religion*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Gerrit Singgih, Emanuel. “Moderasi Beragama Sebagai Hidup Yang Baik: Tiga Tanggapan Terhadap Buku Pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia Mengenai Moderasi Beragama.” *Gema Teologika* 2, no. 10 (2022): 191–212.
- Green, Steven K. *Separating Church and State: A History*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2022.
- Grilli, Massimo and Joseph Maleparampil (eds.). *Il Diverso e Lo Straniero Nella Bibbia Ebraico-Cristiana. Uno Studio Esegético-Teológico in Chiave Interculturale*. Bologna: EDB, 2013.
- Hadiz, Vedi R. *Populisme Islam Di Indonesia Dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Harmakaputra, Hans A. “Fratelli Tutti and Interreligious Friendship: An Indonesian Christian Reflection.” *The Journal of Social Encounters* 5, no. 1 (2021): 14–18. [https://digitalcommons.csbsju.edu/social\\_encounters/vol5/iss1/4](https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol5/iss1/4).
- Jones, Patrick A. and Robert L. Wailer. “A Model of Catholic Social Teaching: Assessing Policy Proposals.” *The Catholic Social Science Review* 15 (2010): 283–95.
- Kasimow, H., and A. Race. *Pope Francis and Interreligious Dialogue: Religious Thinkers Engage with Recent Papal Initiatives*. Palgrave: MacMilan, 2018.
- Luciani, Rafael. *Pope Francis and the Theology of the People*. New York: Marynoll, 2018.
- McCarthy, D.J. *Old Testament Covenant. A Survey of Current Opinions*. Oxford: Basil Blackwell, 1973.
- Mudde, Cas. *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Mudde, Cas, and Cristobal Rovira Kaltwasser. “Populism. A Very Short Introduction.” *Populism: A Very Short Introduction*, 2017, 1–152.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme: Politik Identitas Dan Dinamika Elektoral*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Müller, Jan-Werner. *What Is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
- Nicolaci, Marida. “The ‘People of God’ and Its Idols in the ‘One and Other’ Testaments: How Sacred Scripture Challenges Populist Rhetoric.” *Concilium* 2 (2019): 74–88.
- Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Samosir, Leonardus & Haq, Mochamad Ziaul. “Fratelli Tutti: Brotherhood Without Boundaries.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2019): 267–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.17936>.

- Simamora, S. Tano. *Bibel. Warisan Iman, Sejarah Dan Budaya*. Jakarta: Obor, 2014.
- Ska, Jean-Louis. *Introduzione Alla Lettura Del Pentateuco. Chiavi per l'interpretazione Dei Primi Cinque Libri Della Biblia*. Bologna: EDB, 2012.
- Whitehead, Andrew L., and Samuel L. Perry. *Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Wijanarko, Robertus. ““Religious Populism and Public Sphere in Indonesia.”” *Jurnal Sosial Humaniora*. Special Ed (2021): 1–9.
- Witte, John Jr. “The History of Separation of Church and State: Facts, Fictions, and Future Challenges.” *Journal of Church and State* 48 (2006): 15–46.
- Yimlaz, Ihsan. “Right-Wing Hegemony and Immigration: How the Populist Far-Right Achieved Hegemony Through the Immigration Debate in Europe.” *Current Sociology* 60, no. 3 (2012): 368–81.